

HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

BABARI*

PENGANTAR

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan bahwa salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan ayat 2 menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.¹ Selanjutnya UU No. 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia pasal 10 ayat 1 menetapkan bahwa semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya.²

Dari ketentuan-ketentuan itu terlihat ikhtiar formal pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia di segala bidang kehidupan. Namun semua ikhtiar itu belum dapat dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh karena suasana kehidupan di bidang politik, ekonomi dan keamanan di masa lampau belum stabil. Suasana stabil dalam semua aspek kehidupan bernegara akan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyediakan semua fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, perabot-perabotnya, buku-buku pelajaran, alat peraga dan mengangkat guru-guru. Selain itu rakyat sebagai pihak yang wajib menyekolahkan anak-anaknya sudah lebih siap baik mental ataupun material. Secara mental mereka menyadari bahwa memasukkan anak-anak ke sekolah akan membawa manfaat bagi kehidupan keluarga umumnya dan bagi anak-anak

* Staf CSIS.

¹Lihat UUD 1945.

²Kamadjaja, *Pendidikan Nasional Pancasila* (Jogja: U.P. Indonesia, 1966), hal. 101.

itu sendiri di masa depan. Persiapan material juga penting karena sekolah memerlukan banyak biaya.

Tap No. II/MPR/1983 tentang GBHN di sektor pendidikan antara lain menetapkan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar serta meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah.¹ Ketetapan MPR itu perlu diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV nanti. Sehubungan dengan usaha memantapkan pelaksanaan wajib belajar bagi anak usia 7-12 tahun itu, maka pemerintah perlu mempunyai data yang pasti tentang keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia dan siap pakai, jumlah guru dan pemerataan dalam penempatannya serta jumlah anak usia 7-12 tahun yang belum mengikuti pendidikan formal di seluruh wilayah tanah air. Tujuan penyelenggaraan wajib belajar di tingkat sekolah dasar adalah agar orang tua dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk menyekolahkan anak-anaknya yang berusia 7-12 tahun di tingkat sekolah dasar sampai tamat. Di pihak lain pemerintah wajib menyediakan semua sarana dan fasilitas pendidikan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan wajib belajar itu. Hasil sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa di antara anak usia 6-12 tahun yang berjumlah 26.741.290, 23 juta anak telah mengikuti pendidikan di tingkat sekolah dasar sedangkan sisanya belum.

Ada banyak faktor penghambat mengapa anak usia 7-12 tahun tidak/belum dapat masuk sekolah atau putus sekolah pada kelas-kelas awal di Sekolah Dasar. Yang dimaksudkan dengan faktor penghambat adalah suasana kehidupan calon anak didik dalam keluarganya, masyarakatnya dan lingkungan alam sekitarnya yang tidak menunjang dirinya untuk belajar di tingkat sekolah dasar sampai tamat. Tulisan ini membahas hambatan-hambatan yang akan dihadapi pemerintah dan para orang tua bersama anak-anaknya pada tahap pelaksanaan wajib belajar yang akan dimulai secara serentak di seluruh pelosok tanah air dalam masa Pelita IV nanti. Hambatan-hambatan itu antara lain: (1) faktor geografis; (2) faktor kehidupan ekonomi keluarga; (3) faktor tradisi masyarakat setempat; (4) faktor sarana dan fasilitas pendidikan; (5) faktor kurikulum pendidikan. Sebagai penutup akan diajukan beberapa pemikiran yang kiranya dapat dipergunakan sebagai jalan atau cara mengatasi hambatan-hambatan itu, sehingga proses penyelenggaraan wajib belajar sebagai usaha meningkatkan taraf hidup warga negara dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga negara Indonesia dapat terlaksana secara baik.

¹Lihat Tap No. II/MPR/1983 tentang GBHN, dalam *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1983* (Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1983), hal. 102.

FAKTOR GEOGRAFIS

Dari segi geografis negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut dan sepertiganya daratan dalam bentuk pulau-pulau sebanyak 13.667 buah terbagi atas 6.044 buah pulau yang memakai nama dan dihuni manusia serta sisanya belum mempunyai nama dan belum dihuni manusia. Kepadatan penduduk pulau-pulau yang dihuni berbeda-beda: Sumatra 59 jiwa/km, Jawa 690 jiwa/km, Kalimantan 12 jiwa/km, Sulawesi 55 jiwa/km, Maluku 19 jiwa/km, Irian Jaya 3 jiwa/km, Bali 444 jiwa/km, Nusa Tenggara Barat 135 jiwa/km, Nusa Tenggara Timur 57 jiwa/km dan Timor Timur 37 jiwa/km.¹ Dengan demikian Pulau Jawa dan Bali merupakan pulau yang padat penduduknya.

Selain kepadatan penduduk yang tidak merata di semua pulau, tempat pemukiman penduduk juga tersebar mulai dari daerah pesisir sampai ke daerah pedalaman dengan konsentrasi penduduk di kota-kota. Kecuali di Pulau Jawa dan Bali, jaringan komunikasi dan transportasi di daerah pedalaman umumnya masih sangat kurang dan di wilayah-wilayah tertentu bahkan belum ada sama sekali. Karena itu daerah pedalaman sering disebut sebagai daerah terpencil. Penduduk daerah terpencil ini umumnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di suatu wilayah yang luas.

Cara pemukiman penduduk seperti ini akan menyulitkan pelaksanaan program wajib belajar. Umumnya di daerah terpencil ini sarana dan fasilitas pendidikan sangat sulit pengadaannya. Hal ini dapat diketahui dari monitoring team operasi Vidya Griya yang menunjukkan bahwa pembangunan gedung SD Inpres di daerah pedalaman umumnya mengalami kesulitan karena faktor geografis sehingga pemborongnya tidak menyelesaikannya dan guru yang ditugaskan untuk mengajar di daerah itu tidak mampu melaksanakan tugasnya secara baik. Selain itu penduduk di daerah terpencil yang umumnya hidup dari bercocok tanam selalu menggunakan tenaga anak-anaknya untuk membantu mereka bekerja.

Untuk mengatasi hambatan ini pemerintah selama Pelita III telah mengembangkan sistem Sekolah Dasar Kecil yang jumlah muridnya kecil, ruang kelasnya hanya 3 dan tenaga guru yang mengajar hanya 1 atau 2 orang saja dengan tingkat kelasnya tetap, yaitu kelas satu sampai dengan enam. Agar pelajaran dapat berjalan lancar maka penyajian bahan pelajaran dilakukan dalam bentuk modul. Pertanyaan timbul apakah kita telah mampu menyiapkan semua bahan pelajaran dalam bentuk modul dan apakah guru-gurunya telah siap menyajikan pelajaran dalam bentuk itu.

¹Lihat *Hasil Pemetaan Sensus Penduduk 1980* (Jakarta: Biro Pusat Statistik 1982).

Penyajian bahan pelajaran dalam bentuk modul memerlukan biaya yang besar. Apakah biaya itu akan menjadi beban orang tua murid yang berdomisili di daerah pedalaman yang pendapatannya relatif kecil? Bila kita meninjau sepintas pelaksanaan penyajian bahan pelajaran dalam bentuk modul di Sekolah Proyek Perintis Pembangunan yang dibina oleh 10 IKIP negeri di Indonesia, maka kita dapat mengatakan bahwa pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya, karena ketiadaan dana untuk menyiapkan seluruh paket pelajaran dalam bentuk modul.

Masalah lain adalah tenaga guru. Dari berita-berita surat kabar diketahui bahwa banyak guru tidak betah mengajar di daerah pedalaman. Alasannya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa daerah pedalaman itu sepi karena tidak ada tempat rekreasi/hiburan; ada juga yang mengatakan bahwa mereka selalu mengalami keterlambatan dalam menerima gaji atau kenaikan pangkat dan golongan. Selain itu tenaga guru yang mengajar di daerah pedalaman umumnya tamatan SGA/SPG yang rupanya belum biasa menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk modul.

Hambatan geografis ini perlu dipikirkan sungguh-sungguh karena sebagian penduduk bangsa kita bertempat tinggal di daerah pedalaman yang jaringan komunikasi dan transportasinya masih terbatas. Perhatian bagi penduduk daerah pedalaman ini perlu diberikan secara khusus agar perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar di antara penduduk kota dan daerah sekitarnya dan penduduk desa yang terletak di daerah pedalaman tidak semakin melebar. Dengan cara ini kita sebenarnya melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang bertempat tinggal di daerah pedalaman untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri. Usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja dan produktivitas kerja.¹

Dengan demikian pendidikan dan latihan yang dilaksanakan melalui proyek wajib belajar ini juga dipandang sebagai satu bentuk investasi yang hasilnya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Seorang dapat meningkatkan hasil kerjanya melalui peningkatan pendidikan.² Sebagaimana diketahui, daerah pedalaman di wilayah tanah air kita merupakan daerah potensial yang masih menunggu tanggungan trampil untuk mengembangkan dan mewujudkannya menjadi suatu kenyataan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup penduduk yang bermukim di atasnya.

¹Prijono Tjiptoherijanto et. al. (ed.), *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982), hal. 17.

²*Ibid.*, hal. 17.

FAKTOR KEHIDUPAN EKONOMI KELUARGA

Kehidupan ekonomi keluarga dalam uraian ini diartikan sebagai suatu keadaan hidup keluarga yang jumlah pendapatannya lebih kecil atau sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok keluarga itu adalah pangan, sandang dan papan. Kebutuhan lain seperti menyekolahkan anak telah berada di luar kemampuannya. Pendapatan keluarga yang kecil itu biasanya mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan kepala keluarga, lapangan kerja dan statusnya dalam pekerjaan itu. Artinya, makin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, makin mudah ia memperoleh pekerjaan dan makin baik statusnya dalam pekerjaan itu sehingga pendapatan yang diterimanya akan makin tinggi pula. Dengan perkataan lain kita dapat mengatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga makin besar pula pendapatannya dan makin kecil jumlah anak dalam keluarga itu yang tidak bersekolah atau putus sekolah di tingkat sekolah dasar.

Kepala keluarga yang mempunyai tingkat pendidikan rendah atau tidak pernah bersekolah umumnya bekerja sebagai petani atau nelayan di daerah pesisir dan sebagai buruh kasar di daerah perkotaan dengan pendapatan per bulan relatif kecil. Pada umumnya mereka merupakan keluarga miskin. Hasil Sensus Penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta rumah tangga petani yang rata-rata mengusahakan tanah pertanian kurang dari $\frac{1}{2}$ ha. Di antaranya 6 juta rumah tangga petani rata-rata mengusahakan tanah pertanian seluas $\frac{1}{4}$ ha. Tanah pertanian itu ada yang milik sendiri ada yang milik orang lain.¹ Belum ada data yang terperinci tentang rumah tangga nelayan di daerah pesisir atau rumah tangga buruh kasar dan para gelandangan di daerah perkotaan akan tetapi kondisi kehidupan keluarga mereka umumnya sangat memprihatinkan.

Pendapatan kepala keluarga per bulan yang kecil sehingga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan pokok untuk hidup wajar memaksa isteri dan anak-anaknya bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di desa pertanian anak-anak itu biasanya bekerja di kebun atau tegalan, di desa nelayan membantu menangkap ikan atau merajut jala yang rusak, dan di kota umumnya bekerja sebagai penjual koran, penyemir sepatu, kondektur mikrolet atau pengumpul barang-barang bekas.

Golongan masyarakat ini melihat sekolah sebagai lembaga pendidikan di luar jangkauan kemampuan mereka, meskipun mereka ingin bersekolah atau menyekolahkan anak-anaknya. Sejak tahun ajaran 1977 pemerintah

¹Lihat *Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI 1 Maret 1983*, hal. 46.

Tabel 1

PENDUDUK BERUMUR 7-12 TAHUN MENURUT PROPINSI DAN STATUS SEKOLAH
1980

Propinsi	Belum Pernah Sekolah		Masih Sekolah		Sudah Tidak Sekolah Lagi		Jumlah
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. DI Aceh	47.485	10,20	401.420	86,28	16.366	3,52	464.261
2. Sumatera Utara	126.981	8,37	1.334.287	87,85	57.453	3,78	1.518.721
3. Sumatera Barat	39.842	6,79	524.205	89,34	22.711	3,87	586.758
4. Riau	54.659	15,38	287.885	81,02	12.784	3,60	355.328
5. Jambi	43.609	17,41	189.717	75,75	17.135	6,84	250.461
6. Sumatera Selatan	97.988	12,28	661.361	82,92	38.289	4,80	797.638
7. Bengkulu	17.504	12,79	113.486	82,94	5.839	4,27	136.829
8.. Lampung	114.775	13,41	690.801	80,68	50.529	5,91	856.205
<i>Sumatera</i>	<i>542.833</i>	<i>10,93</i>	<i>4.203.162</i>	<i>84,62</i>	<i>221.206</i>	<i>4,45</i>	<i>4.967.201</i>
9. DKI Jakarta	53.721	5,83	841.204	91,17	27.726	3,00	922.651
10. Jawa Barat	557.711	11,59	3.996.313	83,06	257.243	5,35	4.811.272
11. Jawa Tengah	348.522	8,29	3.654.892	86,94	200.234	4,76	4.203.648
12. DI Yogyakarta	17.471	4,17	394.895	94,36	6.156	1,47	418.522
13. Jawa Timur	414.745	9,00	4.000.787	86,86	190.836	4,14	4.606.368
<i>Jawa</i>	<i>1.392.170</i>	<i>9,30</i>	<i>12.888.091</i>	<i>86,14</i>	<i>682.200</i>	<i>4,56</i>	<i>14.962.461</i>
14. Bali	38.395	9,01	370.094	86,90	17.424	4,09	425.913
15. Nusa Tenggara Barat	92.298	18,84	365.602	74,63	31.976	6,53	489.876
16. Nusa Tenggara Timur	79.787	17,41	366.540	80,00	11.850	2,59	458.177
17. Timor Timur
<i>Nusa Tenggara</i>	<i>210.480</i>	<i>15,32</i>	<i>1.102.236</i>	<i>80,22</i>	<i>61.250</i>	<i>4,46</i>	<i>1.373.966</i>
18. Kalimantan Barat	105.500	25,07	294.496	69,99	20.798	4,94	420.794
19. Kalimantan Tengah	21.433	13,05	135.656	82,59	7.166	4,36	164.255
20. Kalimantan Selatan	40.239	11,11	299.022	82,60	22.746	6,29	362.007
21. Kalimantan Timur	29.959	15,44	152.462	78,60	11.557	5,96	193.978
<i>Kalimantan</i>	<i>197.131</i>	<i>17,28</i>	<i>881.636</i>	<i>77,21</i>	<i>62.267</i>	<i>3,46</i>	<i>1.141.034</i>
22. Sulawesi Utara	20.701	5,76	326.028	90,74	12.554	3,50	359.283
23. Sulawesi Tengah	19.148	8,54	197.899	88,32	7.032	3,14	224.079
24. Sulawesi Selatan	167.896	15,69	857.565	80,15	44.546	5,16	1.070.007
25. Sulawesi Tenggara	19.201	10,92	150.113	85,40	6.458	3,68	175.772
<i>Sulawesi</i>	<i>226.946</i>	<i>12,41</i>	<i>1.531.605</i>	<i>83,73</i>	<i>70.590</i>	<i>3,86</i>	<i>1.829.141</i>
26. Maluku	27.634	11,74	199.804	84,86	8.011	3,40	235.449
27. Irian Jaya	49.846	27,23	122.676	67,02	10.517	3,75	183.039
<i>Maluku & Irian Jaya</i>	<i>77.480</i>	<i>18,51</i>	<i>322.480</i>	<i>77,06</i>	<i>18.528</i>	<i>4,43</i>	<i>418.488</i>
<i>Indonesia¹</i>	<i>2.647.040</i>	<i>10,72</i>	<i>20.929.400</i>	<i>84,76</i>	<i>1.116.041</i>	<i>4,52</i>	<i>24.692.291</i>

Catatan: ¹Tidak termasuk Timor Timur.

Sumber: Sensus Penduduk 1980 Menurut Propinsi, Seri L no. 3, Biro Pusat Statistik.

berusaha secara bertahap menghapuskan uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) di tingkat SD. Namun pungutan melalui BP3 dan pembelian perlengkapan untuk keperluan anak di sekolah tetap dirasakan sebagai beban berat bagi golongan masyarakat ini yang jumlahnya masih cukup besar.

Hasil Sensus Penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa di antara 24.692.291 anak usia 7-12 tahun terdapat 3.763.081 anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Uraian terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Secara umum masyarakat menerima pendapat bahwa sebab utama orang tua tidak menyekolahkan anak usia 7-12 tahun adalah faktor kehidupan sosial ekonomi keluarga. Hal ini juga menyebabkan terjadinya putus sekolah di tingkat SD atau di tingkat selanjutnya. Karena kesulitan ini maka sebagian orang tua belum melihat bahwa menyekolahkan anak usia 7-12 tahun di tingkat SD adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sikap seperti ini menurut pengamatan sementara umumnya terdapat di kalangan orang tua yang hidup sebagai petani/buruh tani, nelayan atau tuna karya dan gelandangan di kota-kota. Tentang kesadaran, umumnya para orang tua telah sadar dan ingin memasukkan anak mereka ke sekolah. Hambatan sosial ekonomi keluarga ini menyebabkan orang tua mengurungkan niatnya itu. Akibatnya partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pendidikan sangat kurang. Pelaksanaan wajib belajar ini perlu juga dilihat sebagai cara untuk menggalakan partisipasi golongan masyarakat ini dalam penyelenggaraan pendidikan formal.

FAKTOR TRADISI MASYARAKAT SETEMPAT

Suatu masyarakat yang terpencil karena bertempat tinggal di daerah pedalaman atau di pesisir yang belum memiliki jalur komunikasi/transportasi dan golongan masyarakat buruh kasar serta kaum gelandangan di kota umumnya memiliki sikap tertutup terhadap perubahan dan pembaharuan. Sebagai akibatnya mereka mempunyai pandangan yang rendah mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Menyekolahkan anak merupakan hal yang merugikan, karena tenaga anak-anaknya tidak dapat dipakai untuk mencari nafkah bagi kepentingan keluarga. Bagi mereka sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal yang memberikan beban berat karena memerlukan banyak biaya. Di pihak lain apabila anak-anaknya mampu menyelesaikan salah satu tingkat pendidikan formal tertentu belum pasti mereka langsung mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk mengubah pola hidup keluarganya.

Ada lagi orang tua yang berpendapat bahwa mereka hanya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bersekolah sampai mereka mampu

membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia sederhana. Artinya memberikan kesempatan 2 atau 3 tahun belajar di SD. Setelah itu mereka kembali bekerja bersama orang tuanya. Anak-anak yang hanya duduk di kelas II atau III SD ini akan kembali menjadi orang yang lupa huruf pada saat mereka menjelang dewasa, apabila lingkungan di sekitarnya tidak memberikan kemungkinan kepada mereka untuk terus mengembangkan kemampuan baca tulisnya yang sederhana itu. Menurut perkiraan sementara saat ini penduduk Indonesia yang berusia 7-44 tahun yang masih buta huruf atau lupa huruf berjumlah 22.759.000 orang. Di dalam jumlah ini terdapat 2.647.040 anak berusia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah dan yang akan menjadi sasaran pelaksanaan wajib belajar ini.¹

Pandangan mengenai anak wanita juga tidak menunjang usaha pengembangan pendidikan di daerah pedesaan. Para orang tua di desa umumnya tidak rela membiarkan anak-anak wanita apalagi yang usianya menjelang remaja untuk pergi ke sekolah yang letaknya jauh dari rumah. Di samping itu ada kebiasaan di beberapa lingkungan masyarakat pedesaan tertentu yang mengawinkan anak wanita dalam usia yang relatif muda. Kebiasaan seperti ini turut menjadi faktor yang menyulitkan pelaksanaan wajib belajar bagi anak wanita usia 7-12 tahun. Pada usia ini anak wanita telah memasuki masa pubertas dan mereka telah disebut gadis remaja.

FAKTOR SARANA DAN FASILITAS PENDIDIKAN

Yang dimaksudkan dengan sarana dan fasilitas pendidikan adalah gedung sekolah bersama semua perlengkapannya berupa bangku murid, meja dan kursi guru, lemari buku, papan tulis, buku-buku pegangan guru dan murid, beserta alat-alat penunjang pelajaran ketrampilan yang dapat mempermudah proses pelaksanaan wajib belajar terutama di daerah pedesaan. Tentang pengadaan sarana dan fasilitas itu pemerintah telah melaksanakannya secara sungguh-sungguh sejak tahun 1973 dengan membangun gedung SD Inpres lengkap dengan perabotnya, merehabilitasi gedung SD lama, mendirikan gedung SD Kecil di tempat terpencil bersama rumah kepala sekolahnya. Karena itu pemerintah begitu optimis dalam membuat proyeksi tentang daya tampung anak usia sekolah dasar yang menunjukkan bahwa pada akhir Pelita III anak usia sekolah dasar telah dapat ditampung seluruhnya di sekolah dasar yang ada. Demikian pula halnya dengan pengadaan buku-buku pegangan guru dan murid dan buku-buku untuk mengisi perpustakaan sekolah.

Pertanyaan yang timbul dewasa ini ialah apakah proyeksi pemerintah yang optimistis itu dapat tercapai sepenuhnya. Pertanyaan ini timbul karena hasil

¹Lihat *Suara Karya*, 13 Desember 1982.

operasi Vidya Griya yang dilakukan oleh Opstib pusat di beberapa daerah menunjukkan bahwa pembangunan gedung SD Inpres itu banyak yang terbengkelai karena ditinggal pergi oleh pemborongnya di samping banyak gedung SD Inpres yang telah rampung kembali runtuh karena pembangunannya dilakukan tidak sesuai dengan bestek yang ada. Berapa besar jumlah gedung SD Inpres yang mengalami nasib semacam itu belum diketahui secara pasti. Di pihak lain waktu dimulainya pelaksanaan wajib belajar di seluruh pelosok tanah air semakin mendekat, yaitu 1 April 1984.

Selain itu perlu dipertanyakan apakah pendistribusian buku-buku paket dari Departemen P dan K selama ini untuk tingkat sekolah dasar benar-benar sudah mencapai semua SD di seluruh pelosok tanah air. Dari pengamatan sementara melalui ungkapan dalam surat kabar terlihat bahwa pada umumnya sekolah dasar yang terletak di daerah pedalaman dan daerah pesisir yang belum memiliki jalur transportasi yang baik dengan kota terdekat mengeluh karena belum menerima kiriman buku-buku paket itu. Tersedianya buku-buku yang dapat diperoleh secara mudah dan murah dan bila perlu secara cuma-cuma merupakan hal yang sangat menunjang pelaksanaan wajib belajar karena salah satu hambatan bagi para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya adalah kehidupan sosial ekonomi keluarga.

Satu hal lagi yang perlu dipecahkan sedini mungkin adalah masalah penempatan tenaga guru di sekolah-sekolah yang banyak menampung anak-anak yang terkena wajib belajar. Karena usia mereka berkisar antara 7-12 tahun dan mereka berada bersama anak-anak lain yang berusia 5-6 tahun, maka diperlukan guru-guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar serta sabar dan bijaksana dalam mengambil tindakan berupa teguran atau pujian. Tindakan guru ini akan turut menentukan apakah anak yang terkena wajib belajar ini akan terus mengikuti pelajaran sampai tamat ataukah mereka akan putus sekolah karena tidak senang terhadap tindakan gurunya. Bila mereka putus sekolah maka pelaksanaan wajib belajar ini akan gagal dan tidak mencapai maksud dan tujuan program wajib belajar ini.

FAKTOR KURIKULUM

Kurikulum diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan dan usaha pendidikan yang terorganisasi dan terintegrasi yang dilakukan dalam hubungan dengan lembaga pendidikan dan terarah pada tercapainya tujuan pendidikan nasional.¹ Karena anak-anak yang terkena wajib belajar sudah berusia di antara 7-12 tahun, maka kurikulum tidak boleh terlalu menitikberatkan mata pelajaran (subject matter) dengan metode resitasi, tetapi seharusnya merupakan perpaduan antara mata pelajaran dan sistem yang berpusat pada

¹Kamadjaja, *op. cit.*, hal. 165.

pengalaman dengan menggunakan metoda memecahkan masalah (problem solving method). Dengan cara ini daya kreasi dan swadaya anak didik akan timbul.

Kurikulum dan silabus bagi anak-anak yang terkena wajib belajar seharusnya disusun sedemikian rupa sehingga mereka dapat memperoleh ketrampilan-ketrampilan khusus sedini mungkin sebagai bekal untuk berdiri sendiri dalam kehidupan masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena anak-anak yang terkena wajib belajar sangat kecil kemungkinannya melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi, atau mereka akan putus sekolah sebelum belajar selama 6 tahun sesuai dengan ketentuan wajib belajar. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak-anak yang ikut dalam wajib belajar itu umumnya berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang lemah atau golongan masyarakat miskin.

Direktorat Pendidikan Dasar Departemen P dan K sejak tahun ajaran 1979 mengadakan persiapan dengan membuka Proyek Peningkatan Wajib Belajar (PPWB) antara lain di Seyegan, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Ada dua kesulitan yang selalu dihadapi oleh proyek itu, yaitu: (1) orang tua menginginkan agar anak-anaknya tetap membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari seperti menganyam dinding dari bambu atau membakar batu bata; dan (2) anak yang ikut wajib belajar ini di dalam kelas ternyata mudah tersinggung bila dimarahi gurunya, dan selalu menunjukkan sikap bandel serta kadang-kadang menantang gurunya untuk berkelahi.¹ Kesulitan yang pertama dapat diatasi melalui kerja sama aparat kelurahan, organisasi pemuda dan PKK yang berusaha memberikan penerangan kepada orang tua tentang pentingnya anak-anak mereka ikut dalam wajib belajar. Sebaliknya kesulitan yang kedua hanya dapat diatasi oleh sikap guru yang matang dan bijaksana serta penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

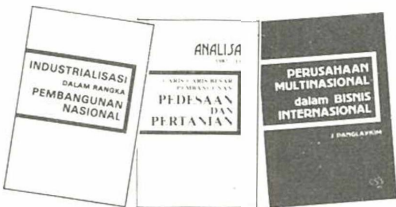
Bahan ilustrasi di atas perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan wajib belajar ini, agar tujuan dapat dicapai, yaitu membina anak yang cerdas dan trampil sehingga mampu menjadi tenaga kerja produktif. Untuk itu rupanya perlu diadakan penyesuaian kurikulum tingkat SD, terutama bagi sekolah-sekolah dasar yang banyak menampung anak-anak yang terkena wajib belajar. Penyesuaian kurikulum ini misalnya dilakukan dalam mata pelajaran pembinaan ketrampilan khusus atau dalam beberapa mata pelajaran seperti membaca, menulis dan bahasa Indonesia. Semua mata pelajaran ini disusun dan disajikan secara fungsional sesuai dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Ini berarti bahwa buku-buku paket bagi sekolah dasar harus disusun

¹Lihat *Tempo*, 19 Februari 1983 (Ruang Pendidikan).

kembali sedemikian rupa sehingga isinya adalah pengetahuan praktis, yang dapat langsung dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya mereka akan memperoleh hasil tertentu.

PENUTUP

Sebagai penutup uraian ini perlu kiranya ditegaskan kembali tiga hal berikut. *Pertama*, wajib belajar bagi anak usia 7-12 tahun di sekolah dasar akan dimulai pada 1 April 1984. Bila di suatu sekolah jumlah anak usia 7-12 tahun yang terkena wajib belajar lebih dari 10 orang, maka anak-anak itu perlu dikumpulkan dalam satu kelas tersendiri. Maksudnya mereka tidak belajar bersama dalam satu kelas dengan anak usia 5-6 tahun. Perhatian terhadap mereka dapat diberikan secara khusus sesuai dengan kebijakan penyesuaian kurikulum bagi mereka. Bila perlu disusun satu kurikulum khusus bagi anak-anak yang terkena wajib belajar. *Kedua*, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan gedung SD Inpres perlu mendaftar kembali SD Inpres termasuk SD Kecil di daerah pedalaman yang siap menampung anak usia sekolah dasar termasuk anak usia 7-12 tahun yang terkena wajib belajar. Perlu juga dilakukan pendataan anak usia 7-12 tahun di setiap wilayah di seluruh tanah air. Departemen P dan K perlu mengecek apakah buku-buku paket yang telah diedarkan benar-benar sudah diterima di SD masing-masing. *Ketiga*, penyebarluasan informasi tentang wajib belajar yang dewasa ini telah dilakukan oleh TVRI perlu didukung oleh media massa yang lain. Instansi pemerintah yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan wajib belajar ini perlu juga melakukan penyebarluasan informasi ini. Dengan cara ini kita mengharapkan agar pada tanggal 1 April 1984 wajib belajar bagi anak usia 7-12 tahun benar-benar dapat dimulai serentak di seluruh wilayah tanah air.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,— langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/ bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau lang-sung pada:

**BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, Telepon 349489**

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peniliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

**PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-35.**

